

Difusi Inovasi Gebyar Inovasi dan Kabupaten Tulungagung 2024 Dalam Upaya Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah

Deasy Christmassari

BRIDA tulungagung

Email: desychrist3@gmail.com

Abstract

Innovation is an important key in regional development. Through innovation, regions can increase productivity, competitiveness and community welfare. Innovation allows disadvantaged areas to become more competitive. Regions are considered the key to effective innovation system performance. Tulungagung Regency has received the regional innovation title as an "Innovative region" from 2021 to 2024 accompanied by positive developments in the regional innovation score but has not succeeded in increasing its title to become a "very innovative region". This qualitative research conducted a case study on the Tulungagung Regency Innovation and Technology Festival 2024 using the diffusion of innovation theory in an effort to increase the regional innovation index of Tulungagung Regency. The results of the research show that the Innovation and Technology Festival has been implemented well, 70% of which has implemented the diffusion of innovation, however, it is noted that there is an evaluation of improvements that need to be made in the implementation of subsequent activities in order to optimize the impact and contribute directly to increasing the innovation index of Tulungagung Regency.

Keywords: Diffusion of innovation, innovation management, public management.

A. Latar Belakang Teoritis

Inovasi merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan daerah. Melalui inovasi, daerah dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi juga dapat membantu daerah untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan bencana alam. Inovasi daerah dapat diartikan sebagai proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Filosofi penerapan otonomi daerah adalah untuk mempercepat kemajuan daerah. Daerah diharapkan lebih lincah dalam melaksanakan pembangunan, ditopang kemandirian mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional (Setiawan 2017). Inovasi memungkinkan daerah yang tertinggal menjadi lebih kompetitif. Daerah dianggap sebagai kunci kinerja sistem inovasi yang efektif (Cilotek & Golejewska, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 yang berbunyi "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi" menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan pelayanan publik, b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan c) peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan juga mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Inovasi harus dilaksanakan secara terstruktur, massif, dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, sejatinya inovasi daerah sangat penting dan strategis untuk kemajuan nasional. Seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan tidaklah berarti apabila tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai kondisi daerah masing-masing. Diperlukan strategi dan Langkah-langkah yang jelas dalam implementasi regulasi dan kebijakan inovasi daerah sehingga dapat berdampak nyata dalam percepatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial agar kebijakan memberikan dampak yang selaras dengan tujuan adanya kebijakan tersebut (Ismail, 2022). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah (Warman, 2022). Implementasi kebijakan akan diterjemahkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan dikatakan berhasil apabila tujuan kebijakan tersebut dapat diraih, dan sebaliknya (Widuri, 2020). Kabupaten Tulungagung

termasuk dalam kategori Daerah Inovatif dengan perolehan skor sebesar 42,26 pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023. Hasil indeks inovasi daerah yang didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Badan Riset dan Teknologi Daerah (BRIDA) Tulungagung harus merupakan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dibentuk tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung dituntut mulai menelaah apa saja kajian maupun inovasi yang pernah dilakukan. Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung. Penyelenggaraan Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 yang dilakukan oleh BRIDA Tulungagung bertujuan untuk menstimulasi inisiasi inovasi daerah serta meningkatkan diseminasi inovasi yang dicetuskan agar dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan di Kabupaten Tulungagung dan tidak berakhir dalam ide dan konsep inovasi saja. Inovasi telah banyak dilakukan masyarakat Tulungagung pada sektor-sektor pertanian, perikanan, dan lain sebagainya namun belum ditindak lanjuti dengan optimal.

Landasan Teori

Manajemen adalah hal abstrak namun hasilnya dapat dilihat dalam implementasinya pada organisasi. Manajemen meliputi siklus kegiatan sistematis serta terkoordinir dalam pemanfaatan sumber daya organisasi demi mencapai tujuan organisasi (Firdausijah et al, 2023). Manajemen diperlukan untuk mengatur dan memberi arahan pada individu-individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Firdausijah et al, 2023).

Konsep manajemen publik berkembang sejak lahirnya konsep The New Public Management pada tahun 1990 oleh Pasolong (2007) yang memberi penekanan pada pergeseran paradigma tradisional kepada perhatian kinerja dan hasil kerja pada administrasi, meninggalkan birokrasi klasik menjadi lebih fleksibel bagi pekerja, penetapan target dan tujuan organisasi serta personal yang lebih tegas untuk melakukan evaluasi mendalam dengan indikator ekonomi, efisiensi dan efektivitas, staf senior dituntut lebih memiliki komitmen politis dengan manajemen pelaksanaan daripada bersikap netral, pengurangan fungsi pemerintah melalui proses privatisasi sehingga pemerintah lebih berfungsi sebagai pemerhati pasar, pembuat kontrak kerja dengan pihak luar dan memberi pelayanan yang tidak terbatas pada birokrasi saja melainkan melibatkan swasta secara aktif.

Globalisasi dan keterbukaan menuntut pelayanan publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, hal ini menjadikan pelayanan publik menjadi krusial dalam pelaksanaan dan pengelolaan manajemen publik (Iwan, 2012). Manifestasi keberhasilan pelaksanaan manajemen publik oleh institusi publik atau pemerintah dapat dikaji melalui peningkatan kualitas pada produk pelayanan yang meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan atau sejumlah aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung (Moenir, 2003). Pelayanan publik dapat dipahami sebagai sebuah proses menyediakan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah/institusi publik baik daerah maupun pusat meliputi pelayanan administratif, barang dan jasa (Iwan, 2012). Pelayanan publik berinteraksi langsung dengan pengguna layanan (masyarakat) meliputi situasi, kondisi dan motivasi yang beragam dan kompleks. Pelayanan publik memerlukan perhatian khusus demi produk pelayanan yang optimal dan tercapainya kepuasan masyarakat.

Fungsi dan tujuan manajemen sektor publik (Hendrayady et al, 2022); (Ritonga et al, 2023) adalah merumuskan dan mengembangkan kebijakan publik, perencanaan dan program dan penganggaran dana agar efektif dan efisien, pelaksana program maupun project publik, tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan sumber daya publik, mengawasi kinerja dan pengendalian risiko, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik agar terus meningkat, pengambilan

kepurusan merujuk pada data dan bukti akuratm mengelola tantangan sosial ekonomi di masyarakat, serta mengupayakan peningkatan akuntabilitas dan tercapainya transparansi dalam manajemen sumber daya publik.

Manajemen sektor publik memiliki fungsi sebagai penggerak bagi lingkungan yang kondusif bagi pemangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis dalam manajemen sektor publik diperlukan untuk membantu pemerintah dan lembaga-lembaga dalam sektor publik lainnya dengan menentukan fokus dan jalan yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pemerintahan serta kemakmuran masyarakat.

Inovasi dapat diidentifikasi dengan banyak jenis inovasi dan klasifikasi dapat bervariasi sesuai dengan objek inovasi. Misalnya, kategori mencakup inovasi dalam sistem sosial-budaya, ekosistem, model bisnis, produk, layanan, proses, organisasi, pengaturan kelembagaan, dll. Klasifikasi juga dapat bervariasi sesuai dengan pendorong inovasi seperti teknologi, pasar, desain, pengguna, dll, atau intensitas inovasi. Kategori inovasi untuk produk atau layanan yaitu incremental dan inovasi radikal, Inovasi Tambahan: peningkatan produk yang disediakan dalam menyediakan kerangka kerja solusi untuk melakukan apa yang tidak dilakukan sebelumnya (Khin et al., 2010).

Institusi yang mampu menampung sukses Integrasi internasional dari inovasi perusahaan menyiratkan pergeseran dari memperoleh keuntungan melalui eksplorasi kemampuan yang mapan melalui posisi baru kekuatan pasar di luar negeri, menuju penciptaan keuntungan inovatif dengan membangun kemampuan baru melalui pertukaran pengetahuan dan pembelajaran kooperatif, dan dengan demikian memanfaatkan jaringan lintas batas untuk pembentukan kegiatan yang berbasis nilai pada generasi yang baru.

Perubahan-perubahan baru-baru ini semakin memperkuat pentingnya relatif pertumbuhan dari keuntungan inovatif, ketika konseptualisasi keuntungan yang inovatif ditafsirkan kembali sesuai dengan kondisi kelembagaan saat ini untuk inovasi. teori laba inovatif perlu direvisi di era teknologi yang lebih besar ini keterkaitan di mana perusahaan tidak hanya harus mempertahankan penyebaran yang memadai melalui penganekaragaman produk tetapi harus dapat mengakses kemampuan terkait (Wahyudi, 2019).

Inovasi Daerah memiliki sasaran yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah (Arifin & Sakti, 2017). Inovasi Daerah dapat berbentuk dalam beberapa inovasi yaitu berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Puspha & Indrawati, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini melakukan studi kasus untuk mengkaji proses difusi inovasi pada Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Kabupaten Tulungagung dengan melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi serta kajian literatur dan dokumentasi sebagai pemenuhan syarat triangulasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Indeks Inovasi Daerah oleh Innovative Government Award (IGA)

Kabupaten Tulungagung bertahan dengan pencapaian predikat daerah inovatif selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2023 (Internal1-14/11/24), (Internal2-12/11/24). Hal ini disampaikan juga oleh Dwi Setyo Suprihatin, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BRIDA Kabupaten Tulungagung bahwasanya predikat yang didapat stagnan selama tahun 2021 hingga 2023,

Tahun 2021 inovatif, tahun 2022 inovatif, tahun 2023 inovatif. Jadi selama 3 tahun terakhir ini predikat Kabupaten kita masih sama yaitu di inovatif belum ada peningkatan semoga ya mbak, semoga nanti kedepan bisa sangat inovatif (Internal4-14/11/24).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 ditetapkan pada 3 Desember 2024 di Jakarta menyatakan bahwa Kabupaten Tulungagung mendapatkan predikat Inovatif dengan skor indeks 59,14. Data primer dan sekunder yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa belum ada peningkatan pencapaian predikat inovasi daerah oleh Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Namun, pada data yang diperoleh menyatakan bahwa terjadi kenaikan sebesar 31 inovasi yang didaftarkan dari tahun 2023 meningkat di tahun 2024 (Internal2-12/11/24).

Slamet Sunarto, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa Kabupaten Tulungagung telah memiliki potensi dan kekuatan untuk melakukan pengembangan dan implementasi inovasi:

Kekuatannya adanya kreativitas OPD terkait inovasi, ini sesuai dengan surat edaran nomor : 100.3.2/213/35.20.01.03/2024 tanggal 28 Maret 2024 terkait 1 (satu) OPD 1 (satu) inovasi, terbentuknya BRIDA yang di dalam tupoksinya terkait Inovasi beserta sub kegiatannya. Kemudian untuk pengembangan dan implementasi daerah berupa penyusunan database menjadi informasi melalui MISIGITA (Manajemen Informasi Inovasi dan Teknologi) ke system inovasi daerah (SIODA). Dan untuk penyebaran informasi inovasi melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan jejaring antar stakeholder atau pemangku kepentingan (Internal1-14/11/24).

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapat informan lainnya bahwa terbentuknya BRIDA, adanya database informasi melalui MISIGITA, sistem inovasi daerah yaitu SIODA serta penyebaran informasi inovasi melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan jejaring antar stakeholder merupakan potensi kekuatan Kabupaten Tulungagung yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan inovasi daerah (Internal4-14/11/24).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah melaporkan kinerja pemerintahannya berdasarkan inovasi daerah. Inovasi Daerah telah terintegrasi Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkontribusi pada Sistem Inovasi Nasional. Oleh karenanya, keberhasilan inovasi daerah memberi pengaruh kepada inovasi nasional (Deru et al, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung mampu mempertahankan predikat daerah Inovatif selama tahun 2021 hingga 2024. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 ditetapkan pada 3 Desember 2024 di Jakarta menyatakan bahwa Kabupaten Tulungagung mendapatkan predikat Inovatif dengan skor indeks 59,14. Data primer dan sekunder yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa belum ada peningkatan pencapaian predikat inovasi daerah oleh Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

Hal ini dapat dipahami dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inisiasi inovasi di Kabupaten Tulungagung relatif kurang berkembang secara signifikan ditunjukkan dengan angka usulan inovasi yang belum cukup memadai terutama di tingkat OPD sehingga pemerintah cenderung fokus dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan inovasi yang sudah ada. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa optimal apabila tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih rendah, padahal inovasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan good governance (Puspha & Indrawati, 2021).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan perolehan predikat inovasi daerah Kabupaten Tulungagung antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kendala dan Solusi
Upaya Peningkatan Predikat Daerah Inovasi Kabupaten Tulungagung

No	Kendala	Solusi
1	Belum disahkannya (belum terbit) perda terkait inovasi	Mengusulkan pengesahan perda terkait inovasi sejak penyusunan konsep hingga teknis pelaksanannya
2	Pemahaman OPD dan Masyarakat	Sosialisasi inovasi kepada OPD dan

	tentang inovasi belum optimal	
3	Pendataan inovasi masih belum maksimal di sektor Pendidikan seperti sekolah-sekolah di Kabupaten Tulungagung	Masyarakat secara daring maupun luring dengan menyelenggarakan seminar, talkshow hingga bimtek Pembuatan pusat database inovasi daerah yang dapat diakses dengan memfasilitasi forum diskusi untuk saran perbaikan konsep inovasi serta peluang permodalan untuk implementasi
4	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan inovasi dan pemeliharaan atau keberlanjutan program inovasi.	Pembuatan pusat database inovasi daerah yang dapat diakses dengan memfasilitasi forum diskusi untuk saran perbaikan konsep inovasi serta peluang permodalan untuk implementasi
5	Keberlanjutan program inovasi di OPD yang masih kurang	Melaksanakan <i>community management</i> kepada forum innovator daerah dengan menyelenggarakan program edukasi rutin serta informasi terbaru tentang inovasi daerah dan kegiatannya
6	Kesulitan dalam merealisasikan peraturan, surat edaran dan lainnya untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh elemen perangkat daerah	Sosialisasi inovasi kepada OPD dan Masyarakat secara daring maupun luring dengan menyelenggarakan seminar, talkshow hingga bimtek
7	Kondisi di lapangan menunjukkan ketika inovator atau pengurus program inovasi pindah tuisi per OPD (Organisasi Perangkat Daerah), maka tidak ada yang melanjutkan inovasi tersebut sehingga inovasi tidak digunakan lagi	Pembuatan pusat database inovasi daerah yang dapat diakses dengan memfasilitasi forum diskusi untuk saran perbaikan konsep inovasi serta peluang kolaborasi dan permodalan untuk implementasi
8	Belum adanya motivasi untuk berinovasi dari perangkat daerah sehingga inovasi akan lebih cenderung tidak ada pengembangan	Melaksanakan <i>community management</i> kepada forum innovator daerah dengan menyelenggarakan program edukasi rutin serta informasi terbaru tentang inovasi daerah dan kegiatannya
9	Kurangnya kesadaran tentang pentingnya inovasi, keterbatasan persepsi OPD dan masyarakat bahwa inovasi selalu berkaitan dengan teknologi	Melaksanakan <i>community management</i> kepada forum innovator daerah dengan menyelenggarakan program edukasi rutin serta informasi terbaru tentang inovasi daerah dan kegiatannya

2. Penyelenggaraan Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024

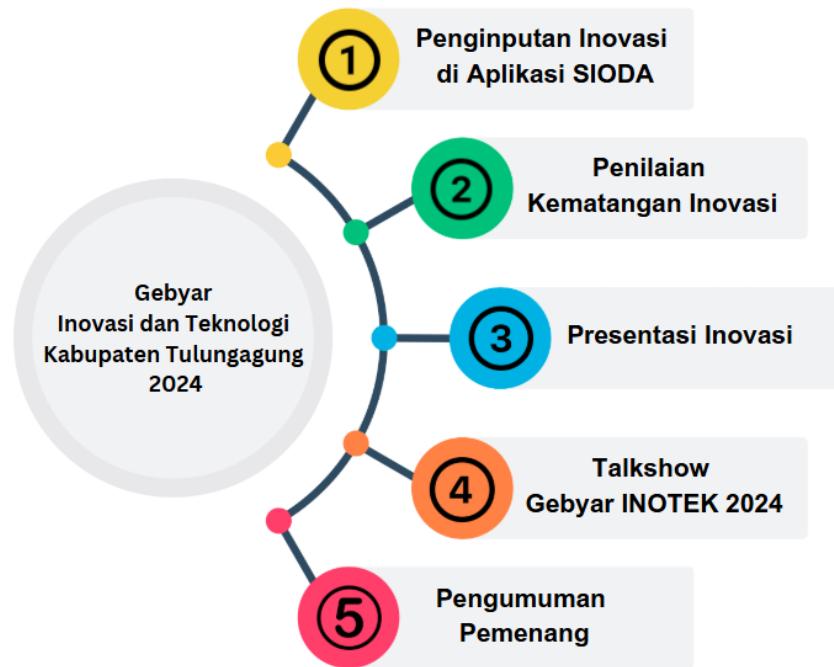
Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 merupakan wadah untuk memamerkan inovasi dan teknologi terbaru, juga sebagai platform untuk membangun jejaring (networking) antara pelaku industri, pemerintah, dan para profesional. Bertujuan untuk mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan inovasi dan teknologi, penyelenggara bekerja sama dengan sponsor yang memiliki visi sama, kegiatan ini bertujuan mengumpulkan para inovator, perusahaan teknologi, investor, serta masyarakat umum untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan memperkenalkan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan signifikan di berbagai sektor industri.

Gambar 1 Gebyar INOTEK
Tulungagung 2024



Pelaksanaan Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 dibagi menjadi tiga jenis inovasi yaitu; pelayanan publik, kesehatan, serta masyarakat dan pendidikan. Adapun tahapan pada pelaksanaannya terbagi menjadi 5 tahapan sebagaimana tertera dalam gambar 4.6

Gambar 2 Sistem Pelaksanaan
Gebyar Inovasi dan Teknologi
Kabupaten Tulungagung 2024



Lima (5) Tahap Pelaksanaan Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 (Internal2-12/11/24) adalah sebagai berikut:

1. Penginputan data pada aplikasi SIODA yang merupakan tahap administrasi dari pengusulan gagasan inovasi, kemudian diperingkatkan sehingga terpilih 3 besar dari skor tertinggi

2. Penilaian kematangan inovasi oleh tim juri internal, kemudian pengusul mempresentasikan gagasan inovasinya
3. Penilaian oleh Tim Juri eksternal
4. Mengikuti talkshow di Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024
5. Pengumuman pemenang

Penyelenggaraan lomba ini diharapkan menjadi ajang untuk mendorong masyarakat dan OPD dalam berinovasi, dengan dukungan biaya pembinaan dan peluang sponsor dalam meningkatkan/ mengembangkan inovasi dan melebarkan sayap untuk pelaku inovasi itu sendiri. Antusiasme OPD, masyarakat dan pihak-pihak terkait sangat baik menghadiri kegiatan ini, terbukti dari jumlah kunjungan yang awalnya hanya sebanyak 300 orang, namun pada pelaksanaannya mencapai ribuan pengunjung.

Evaluasi pasca gebyar inovasi dan teknologi dilaksanakan memberikan catatan bahwa inovasi yang dilombakan masih didominasi oleh OPD sedangkan inovasi dari masyarakat dan sekolahpun masih kurang digali potensinya. Penyampaian informasi yang terencana menjadi masukan kepada penyelenggara sebagai keluhan terbanyak yang disampaikan oleh peserta. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan ekosistem inovasi akan cenderung menurun serta motivasi untuk berinovasi OPD jika konsep inovasi tidak didiseminiasi dan diimplementasikan.

3. Difusi Inovasi Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024

Difusi inovasi adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktik atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Dalam hal ini apabila ide-ide baru ditemukan, disebarluaskan, dan diadopsikan atau ditolak, dan membawa dampak tertentu maka terjadinya perubahan sosial (Muntaha & Amin, 2023). Hasil temuan data penelitian menunjukkan bahwa 5 poin difusi inovasi pada Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Difusi Inovasi Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024

Difusi Inovasi	Temuan Penelitian	Kesimpulan
<i>Knowledge</i>	Kesadaran munculnya ide pada tiga jenis inovasi yang diusulkan dalam Gebyar INOTEK 2024 telah berhasil diidentifikasi dari informan yang diteliti. perlombaan memberikan wawasan bahwasannya kompetisi dalam hal perlombaan akan memunculkan ide-ide baru dan senantiasa untuk terus maju serta eksis dalam melakukan pelayanan publik untuk pemerintahan sedangkan untuk innovator swasta untuk perkembangan dan kemajuan bisnisnya. Setelah penyelenggaraan perlombaan dilanjutkan dengan diadakannya pameran inovasi hal ini menjadi pemicu innovator untuk dapat menciptakan ide-ide inovasi diharapkan dengan adanya kegiatan pameran atau dengan dipublikasikan/didiseminasi inovasinya ke khalayak publik timbulah inovasi-inovasi baru yang ada di masyarakat.	Terlaksana
<i>Persuasion</i>	Penyampaian konsep inovasi melalui talkshow dan stan pameran gebyar inovasi dan teknologi dilakukan. Dukungan sosial media juga dilakukan sebagai media pengenalan inovasi kepada masyarakat demi memunculkan ide-ide baru dari inovator luar serta masyarakat umum agar dapat menggunakan inovasi yang sudah ada dengan baik (agar dapat menggunakan	Terlaksana

<i>Decision</i>	inovasi yang sudah ada dengan baik). Sikap terbuka dan antusias pada ide inovasi telah tercapai dengan bukti antusias peserta yang hadir pada Gebyar INOTEK 2024 telah melebihi target awal.	Sistem pengambilan keputusan memilih atau menolak konsep inovasi yang diajukan oleh penyelenggara dinilai berdasarkan kriteria-kriteria sesuai pedoman pusat, provinsi maupun kabupaten. Keterbatasan waktu untuk penyelenggaraan lomba dan pameran inovasi di akhir tahun 2024 ini tahapannya dimulai dari awal penginputan inovasi di aplikasi sistem sioda pada awal Maret kemudian diseleksi yang memiliki nilai skor tertinggi dirangking sesuai dengan kategori lomba 3 besar masuk dalam tahap selanjutnya yaitu presentasi kepada tim juri eksternal kecuali kategori penilaian publik diambil 20 besar untuk ikut gebyar inovasi di GOR.	Terlaksana namun belum sesuai dengan kebutuhan segmentasi target pengguna inovasi (masih berpusat pada kriteria penilaian instansi pemerintah).
<i>Implementation</i>	Pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan inovasi bagi jenis inovasi masyarakat cenderung mengandalkan kesadaran dan keinginan dari segmentasi pengguna inovasi, sedangkan kedua jenis inovasi lainnya dari OPD dan Kesehatan cenderung mengandalkan sumber daya manusia pengguna yang melek teknologi dan harapan akan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Penyelenggara gebyar inovasi dan teknologi memberikan fasilitas diseminasi inovasi terpilih untuk dapat diimplementasikan melalui kegiatan diseminasi hasil riset dan inovasi di akhir tahun, yang bertujuan mensosialisasikan hasil riset dan inovasi yang telah dilakukan.	Terlaksana, namun belum memberikan dukungan maksimal agar gagasan inovasi dapat diimplementasikan secara masif untuk menghasilkan dampak signifikan.	
<i>Confirmation</i>	Penyelenggara menilai konsep inovasi yang diusulkan layak diberikan tindak lanjut untuk didiseminasi dan diimplementasikan melalui pemeringkatan skor kematangan tertinggi. Inovasi yang telah ikut serta dalam pameran dilakukan dua penilaian yaitu oleh juri eksternal pada sembilan inovasi utama, dan penilaian 20 inovasi stan yang dinilai berdasarkan pemungutan suara dari pengunjung. Pemberian informasi dan coaching kepada inovator juga dilakukan dengan tujuan kebermanfaatan dan pemberdayaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terus dikembangkan sehingga terdapat pembaharuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat	Tidak ada temuan data, laporan maupun publikasi tentang akses untuk penelusuran informasi lebih lanjut tentang gagasan inovasi yang telah dilakukan (diimplementasi-kan atau dihentikan).	

D. Kesimpulan

Kabupaten Tulungagung mempertahankan predikat Daerah Inovatif sejak tahun 2021 hingga 2024 dan dengan peningkatan skor indeks, akan tetapi belum berhasil meningkatkan perolehan predikat inovasi daerah menjadi sangat inovatif disebabkan oleh kurangnya dukungan perda terkait inovasi, kurangnya pemahaman dan kesadaran OPD maupun masyarakat tentang inovasi, keterbatasan anggaran serta tidak adanya integrasi data dan informasi mencakup gagasan inovasi, implementasi inovasi dan laporan baik inovasi lampau yang telah berjalan maupun tidak dilaksanakan. Pelaksanaan Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 dibagi menjadi tiga jenis inovasi yaitu; pelayanan publik, kesehatan, serta masyarakat dan pendidikan. Tahapan pada pelaksanaannya terbagi menjadi 5 tahapan meliputi; (1) Penginputan administrasi di aplikasi sioda, (2) Penilaian kematangan inovasi, (3) Presentasi inovasi, (4) Talkshow Gebyar INOTEK 2024, (5) Pengumuman pemenang.

Identifikasi difusi inovasi pada Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung 2024 menarik kesimpulan bahwa poin knowledge telah terlaksana, poin persuasion terlaksana, poin decision terlaksana namun belum sesuai dengan kebutuhan segmentasi target pengguna inovasi (masih berpusat pada kriteria penilaian instansi pemerintah), poin implementation terlaksana, namun belum memberikan dukungan maksimal agar gagasan inovasi dapat diimplementasikan secara masif untuk menghasilkan dampak signifikan, serta tidak ada temuan data, laporan maupun publikasi tentang akses untuk penelusuran informasi lebih lanjut tentang gagasan inovasi yang telah dilakukan (diimplementasi-kan atau dihentikan) pada poin confirmation.

Tantangan dan kesulitan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan predikat daerah inovasi dalam beberapa tahun berada di peringkat inovatif belum berhasil untuk naik ke peringkat daerah sangat inovatif. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat saran dan rekomendasi untuk mengoptimalkan dampak Gebyar Inovasi dan Teknologi Kabupaten Tulungagung agar pada pelaksanaan selanjutnya dapat memberikan dampak yang lebih signifikan serta membangun budaya inovatif di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat yaitu dengan memperbaiki sistem informasi melalui penyediaan platform database inovasi baik yang telah berlalu, sedang berlangsung maupun gagasan yang dalam tahap penyempurnaan konsep untuk diajukan. Implementasi knowledge management dan community management hendaknya dilakukan dalam pembentukan platform database ini sehingga seluruh informasi yang tersimpan dapat diakses, diunduh untuk dipelajari dan dikembangkan oleh sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan (OPD) maupun masyarakat untuk menstimulasi perkembangan inovasi baik secara konsep maupun kolaborasi dalam implementasi inovasi tersebut.

D. Referensi

- Anggitlistio, Deo Budhi, et al. (2023). Difusi Inovasi Si D'Nok dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 12, No. 3.
- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1, 61-72.
- Cahyani, Vivi R N, et al. (2022). Difusi Inovasi Pelayanan Publik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 11, No. 3.
- Cilotek, D, & A Golejewska. (2022). Efficiency Determinants of Regional Innovation Systems in Polish Subregions. *Gospodarka Narodowa* 311 (3): 24-45. <https://doi.org/10.33119/gn/151792>
- Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). Phases of the Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers1. *British Journal of Management*, 17(3), 215-236.
- Fadhilah, Anis Rizki, et al. (2023). Difusi Inovasi Pelayanan Sedino Mesti Dadi (SEMEDI) Kabupaten Sragen. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 12, No. 3.
- Ismail, H. (2022). Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 6 (1): 143.

- Kartika, Ray Septianis & Simorangkir, Garsy. (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan* 3 [2]: 119-131.
- Kartika, Ray Septianis, et al. (2020). Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pengisian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Inovasi*, Vol. 17, No. 2.
- Leifer, R., O'Connor, G. C., & Rice, M. (2001). Implementing Radical Innovation in Mature Firms: The Role of Hubs. *Academy of Management Executive*, 15(3), 102-113.
- Muntaha, Neca Gamelia & Alfauzan Amin. (2023). Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, serta Elemen Difusi Inovasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2.
- Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. *European Journal of Innovation Management*, 11(1), 51-86.
- Oktaviana, Prita, et al. (2024). Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 13, No. 2.
- Puspha, Taly Clara & Indrawati, L.R. (2021). Strategi Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Mendorong Upaya Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidispliner (JPM)*, Vol. 2, No.1.
- Rogers, Everett M. (1985). Lesson for Guidelines from the Diffusion of Innovation. *Journal on Quality Improvement*, Vol. 21, Number 7.
- Rosyad, Muhammad, et al. (2023). Efektivitas Pengelolaan Data Melalui Aplikasi Malang Data Inovasi dalam Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Pada Innovative Government Award. *Jurnal Respon Publik*, Vol. 17, No. 6.
- Safitri, Rany, et al. (2019). Difusi Inovasi Program Pemerintah: Studi Komunikasi Pembangunan pada Kelompok Wanita Tani Anugerah Kabupaten Padang Pariaman. *JISPO*, Vol. 9, No. 2.
- Wahyudi, Septian. (2019). Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Waluta*, Vol. 5 No. 2.
- Warman. (2022). Policy Implementation, Financial Management, Bureaucratic Innovation, and Community Participation on Regional Development Planning's Effectiveness. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2 (2): 1898–1909
- Wibowo, Imam Tri. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Studi Kasus pada Ditjen Perbendaharaan di D.I. Yogyakarta Tahun 2018. *Indonesian Treasury review*, Vol. 4, No. 4.
- Widuri, NR. (2020). Studi Implementasi Kebijakan Work From Home Pada Pustakawan Di LIPI. *Media Pustakawan* 27 (3): 168–77
- Verona, Roswita, et al. (2023). Penerapan Teori Difusi Inovasi pada Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 6.